

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/342887157>

Pola Kaderisasi Gerakan Islam Puritan: Studi Kritis Terhadap Sistem Pengkaderan Persatuan Islam

Article · February 2020

DOI: 10.20885/millah.vol20.iss2.art4

CITATIONS

0

READS

1,597

3 authors, including:



Pepen Irpan Fauzan

STAI Persatuan Islam Garut

24 PUBLICATIONS 19 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Ahmad Khoirul Fata

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

59 PUBLICATIONS 82 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



MODEL PENERAPAN SYARIAH DALAM NEGARA MODERN: [View project](#)



Kiprah Politik Natsir [View project](#)

Millah

P-ISSN 1412-0992
E-ISSN 2527-922X

JURNAL STUDI AGAMA

DINAMIKA PEMIKIRAN MODERASI ISLAM

Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought
Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis

Konsep Tasawuf Said Nursi: Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Islam
Muhammad Faiz

Pesantren Mlangi: Poros Spiritual Intelektual Islam
di Yogyakarta Abad XVIII-XIX M
Dzulkifli Hadi Imawan

An Analysis of The Divine Principles of
K.H. Abdullah Syafi'ie (1910-1985 M)
Muhammad Choirin

VOL. 19, No. 2 Februari 2020

Millah

JURNAL STUDI AGAMA

Vol. 19, No. 2, Februari 2020

Nama Millah diambil dari QS. al-Hajj 78, yang berarti Thorieqoh, Jalan yang ingin dicapai. Jurnal Millah merupakan jurnal ilmiah yang terbit pertamakali pada tahun 2001, mengkaji dan meneliti bidang studi agama yang diterbitkan dua kali setahun secara tematik yaitu setiap bulan Februari dan Agustus.

Visi

Menjadi salah satu referensi utama dalam bidang studi agama secara akademis baik nasional maupun internasional

Misi

Media pencerahan studi agama dalam memecahkan masalah-masalah sosial-keagamaan

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

M. Roem Syibly

Managing Editor

Yuli Andriansyah

Dzulkifli Hadi Imawan

Editorial Advisory Board

Junanah

Yusdani

Hujair AH Sanaky

Editorial Boards

- M. Umer Chapra, Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank, Saudi Arabia
- Jasser Auda, President of Maqasid Institute Global, which is a think tank registered in the USA, UK, Malaysia and Indonesia, and has educational and research programs in a number of countries., Canada
- Philip Buckley, Department of Philosophy, McGill University, Canada

- Ahmad Munawar Ismail, Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia, Malaysia
- M. Amin Abdullah, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia, Indonesia
- Mohd Roslan Mohd Nor, Department of Islamic History And Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia
- Amir Mu'allim, Department of Islamic Law, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, Indonesia, Indonesia
- Al Makin, Department of Sociology of Religion, Faculty of Ushuluddin, Sunan Kalijaga State Islamic University, Indonesia
- Juhaya S. Praja, Sunan Gunung Djati State Islamic University, Indonesia
- Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Assistant to Editors

Andi Musthafa Husain

Miftahul Ulum

Pola Kaderisasi Gerakan Islam Puritan: Studi Kritis Atas Persatuan Islam

Pepen Irpan Fauzan
STAI Persatuan Islam Garut

Ahmad Khoirul Fata
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: cakfata@gmail.com

Gun Gun Abdul Basit
STAI Persatuan Islam Garut

Abstrak

Kajian ini membahas tentang pola kaderisasi pada organisasi Persatuan Islam (PERSIS), baik dalam konteks sejarah maupun sistem perkaderan kontemporer. Dengan menggunakan analisis deskriptif, kajian ini menemukan fakta bahwa pada sejarah awal pergerakan kaderisasi PERSIS dilakukan secara kultural. Di tahap ini kaderisasi berlangsung secara alami dengan pola hubungan guru-murid. Dalam perkembangannya, kaderisasi PERSIS berjalan lebih terstruktur melalui media pendidikan, baik formal (Pesantren PERSIS) maupun non formal (kursus muballigh/juru dakwah). Pelembagaan kaderisasi PERSIS ditetapkan dalam Qanun (anggaran dasar) PERSIS serta Pedoman Jam'iyah PP PERSIS. Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan fakta bahwa sistem kaderisasi pada PERSIS belum menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan agar PERSIS menyusun sistem perkaderan secara integral pada seluruh stakeholdernya.

Kata Kunci: *Persatuan Islam (PERSIS), Kaderisasi, Kaderisasi Kultural, Kaderisasi Terstruktur*

Puritan Islam Movement Regeneration Patterns: Critical Analysis on Persatuan Islam

Pepen Irpan Fauzan
STAI Persatuan Islam Garut

Ahmad Khoirul Fata
IAIN Sultan Amai Gorontalo

Gun Gun Abdul Basit
STAI Persatuan Islam Garut

Abstract

This study discusses the pattern of regeneration in the Islamic organization of Persatuan Islam (PERSIS), both of historically and contemporary context. By using descriptive analysis, this study found the fact that in its early history, the forming of cadre in PERSIS was done culturally. At this stage, regeneration takes place naturally in the pattern of teacher-student relations. In its further development, the regeneration was more structured through educational media, both formal (PERSIS Pesantren) and non-formal (preaching courses / preachers). The institutionalization of PERSIS regeneration is stipulated in the PERSIS Qanun (articles of association) as well as the PP PERSIS Jam'iyah Guidelines. However, this study also shows the fact that the regeneration system in PERSIS is not yet comprehensive and integrated. Therefore, this study recommends that PERSIS develop an integrated system of justice for all stakeholders.

Keywords: *Persatuan Islam (PERSIS), Regeneration (Forming the cadre), Culturally Regeneration, Structurized Regeneration*

PENDAHULUAN

Salah satu topik keislaman yang jarang dikaji adalah masalah kaderisasi, baik dalam konteks struktural-politis maupun kultural (budaya dan tradisi organisasi). Kaderisasi berasal dari bahasa

Perancis "*cadre*" atau "*les cadres*" yang bermakna anggota inti.¹ Istilah kader juga bisa dirujuk pada bahasa Latin, "*quadrum*," yang berarti empat persegi panjang atau kerangka yang merupakan wujud tulang punggung dari sebuah kelompok. Kader dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary diartikan sebagai "*a small group of highly trained soldiers, workers, managers, etc.*"² Dengan demikian, kader adalah anggota sebuah perkumpulan yang menjadi bagian terpilih (hasil training) dalam lingkup pimpinan atau di sekitar kepemimpinan. Kader berarti pula pasukan inti yang memiliki daya juang tinggi.

Kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam pemerintahan, partai, maupun perkumpulan masyarakat lainnya.³ Zubaedi mendefinisikan istilah kader secara lebih komprehensif sebagai,

"Kelompok manusia yang terbaik karena terpilih dan merupakan tulang punggung (kerangka penopang) dari kelompok yang lebih besar dan terorganisasi secara permanen melalui sebuah proses penanaman nilai-nilai ke dalam diri manusia yang mengacu kepada metode dan sistem penanaman secara bertahap sehingga ia menyetujui dan meyakini kebenaran suatu tujuan dari suatu kelompok atau perkumpulan tertentu. Kemudian, secara terus-menerus dan dengan setia

¹ Istilah cadre awal mulanya berkembang di Perancis sekitar tahun 1830-an. Istilah kader juga sering didentikkan dengan gerakan dan paham marxisme, atau lebih khususnya komunisme. Misalnya, catatan-catatan Mao Tse Tung terkait pentingnya sebuah pelatihan bagi pemuda, agar keturunan-keturunannya bisa mempertahankan dan mengembangkan ajaran Marxisme-Leninisme. Untuk ulasan kontemporer, lihat Melanie Manion, "The Cadre Management System, Post-Mao: The Appointment, Promotion, Transfer and Removal of Party and State Leaders," *The China Quarterly*, no. 102 (1985): 203-33.

² Heinz Antor dkk., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Berlin: Cornelsen, 1996), 157.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>.

turut berjuang dalam proses pencapaian tujuan yang telah disetujui dan diyakininya secara bersama-sama itu.”⁴

Fungsi dan posisi kader dalam suatu organisasi menjadi sangat penting dan krusial. Disamping sebagai pasukan inti pergerakan organisasi, kader juga merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan proses regenerasi dan suksesi kepemimpinan yang teratur dan terjaga dalam sebuah organisasi. Hal yang tak boleh dipandang sebelah mata, secara kuantitatif, kader berfungsi sebagai penambahan anggota organisasi yang akan memperkuat organisasi itu sendiri (*al-quwwah*).

Salah satu organisasi yang juga melakukan proses kaderisasi, baik dalam konteks struktural (kader pemimpin organisasi) maupun fungsional (kader dengan keahlian tertentu) adalah *jam'iyah* Persatuan Islam (PERSIS). Hasil penelitian Nia Erawati Utama menunjukkan fakta bahwa PERSIS berupaya menjalankan fungsi-fungsi organisasi keagamaannya, khususnya terhadap proses-proses pembinaan kader, perekrutan kader, dan pembentukan pemimpin yang khas – yang tidak dimiliki organisasi lain, untuk menghasilkan kader yang berahklak mulia, taat terhadap syariat Islam secara kaffah berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah, serta menjauhi sifat *bid'ah*, *khurafat* dan *takhayul*. Kaderisasi PERSIS juga mengarahkan seorang pemimpin yang dalam kepemimpinannya mempunyai empat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Saw., yaitu *shidiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*.⁵

Kajian ini masih memberikan data awal tentang kaderisasi PERSIS yang bersifat lokal (studi kasus). Dalam penelitian ini tidak dijelaskan mekanisme dan penjenjangan sebagai model baku kaderisasi dalam PERSIS. Demikian juga kaderisasi model kultural

⁴ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 86.

⁵ Nia Erawati Utama, “Kaderisasi Kepemimpinan Persis: Studi Deskripsi Persis Di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur” (Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010), <http://digilib.uinsgd.ac.id/898/>.

secara historis serta proses pendidikan kader melalui lembaga pendidikan luput dari kajiannya. Oleh karena itu, paper ini akan mengkaji secara kualitatif-deskriptif tentang pola kaderisasi PERSIS secara lebih komprehensif, baik dalam konteks historis maupun sistem pengkaderannya itu sendiri.

SELAYANG PANDANG PERSIS

PERSIS berdiri pada rabu, 12 September 1923 di Bandung⁶ oleh sekelompok orang yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh H. Mohamad Zamzam dan H. Mohamad Yunus.⁷ Ada beberapa hal yang melatari pendirian PERSIS yaitu: *Pertama*, dan ini yang utama, adalah persoalan kemunduran masyarakat Islam. Ketika itu secara umum umat Islam di Indonesia tenggelam dalam sikap *taqlid*, *bid'ah*, *churafat* dan *takhayul* yang biasa disebut oleh kalangan reformis sebagai penyakit TBC. Karena itu, mereka berusaha mengadakan pembaharuan sekaligus pemurnian (purifikasi) ajaran Islam pada masyarakat Islam Indonesia dengan slogan yang terkenal, “kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dan membersihkan Islam dari takhayul, churafat dan bid'ah yang mengotorinya”.⁸

Motif pemurnian agama ini memperlihatkan adanya pengaruh paham keagamaan dari Timur Tengah. Ini adalah faktor yang *kedua*. Indikasi ini terlihat bahwasanya para anggota kelompok studi itu dengan kritis mengaji persoalan keagamaan yang dikupas oleh para reformis melalui corongnya majalah *al-Munir* yang disunting

⁶ *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* (Bandung: Sekretaris PP PERSIS, 2015), 3.

⁷ Kajian komprehensif yang khusus membahas PERSIS, lihat Howard M Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Jakarta: Equinox Publishing, 2009); Pepen Irpan Fauzan, “Persatuan Islam dan Permufakatan Islam: Kritik Terhadap Tesis Howard M. Fiederspiel tentang Sejarah Awal Persis,” *STAI Persatuan Islam Garut* 1 (1 Januari 2016): 1-16.

⁸ PP PERSIS, *Tafsir Qanun Asasi-Qanun Dakhili Persatuan Islam* (Bandung: PP Persis, 1984), 4-5.

Abdullah Ahmad di Padang, dan majalah *al-Manar* yang memuat tulisan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir. Topik pembicaraan yang sering didiskusikan oleh kelompok studi itu berkisar pada masalah-masalah aktual yang terjadi di sekitar masyarakat Islam, baik lokal maupun dunia Islam (Timur Tengah) pada umumnya.⁹

Secara formal PERSIS adalah organisasi sosial-keagamaan. Walaupun demikian, bukan berarti PERSIS mengacuhkan sama sekali masalah politik. PERSIS pun turut-serta berkecimpung dalam wacana pergerakan-kekuasaan. Orientasi politik PERSIS bahkan dianggap mempunyai atau mewakili suatu 'sudut pandang yang khas'.¹⁰ Mainstream gerakan PERSIS itu sendiri fokus pada masalah pemikiran keislaman reformistik.

KADERISASI AWAL: MODEL GURU-MURID

Secara historis, proses kaderisasi dalam PERSIS berjalan secara alamiah dan tidak formal, karena perhatian para tokoh-tokohnya untuk membina sekaligus mengader pemimpin umat. Pola yang diperlihatkan oleh Tuan A. Hassan, misalnya, adalah model

⁹ Wawasan tentang fenomena sosio-politis Timur Tengah ini dimungkinkan karena para pendiri PERSIS kebanyakan adalah para haji. Pada waktu itu, ibadah haji selain dimaknai sebagai ritual, juga berfungsi sebagai media pendidikan. Biasanya, yang melaksanakan haji, mereka sekalian menuntut ilmu. Dari sinilah adanya hubungan intelektual Timur-Tengah dengan Nusantara. Ketika di Mekkah dan sekitarnya timbul arus reformasi agama yang diusung oleh kelompok Wahhabi sejak abad 18, dan kemudian lebih mendalam lagi oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha pada abad 19, maka ide inipun mengalir ke Indonesia, termasuk ke Bandung. Lihat Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern "Ulama" in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Crows Nest; Honolulu: Allen & Unwin; University of Hawai'i Press, 2004), 146-147.

¹⁰ Tiar Anwar Bachtar, *Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Politik Persis*, 2019; lihat juga, Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khoirul Fata, "Portraying Political Polarization in Persatuan Islam in the Case of Mohamad Natsir Vs Isa Anshari," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (30 Desember 2019): 205-32, <https://doi.org/10.30821/jcims.v3i2.5589>.

kaderisasi guru-murid. Model kaderisasi guru-murid inilah yang kemudian memunculkan jaringan guru-murid dalam perkembangan gerakan pemikiran keislaman di Indonesia.¹¹ Khususnya pada PERSIS, model kaderisasi guru-murid ini pun berperan terhadap tumbuh-berkembangnya jaringan Pesantren PERSIS.

Selain ahli debat,¹² A. Hassan sangat menaruh perhatian terhadap para pemuda Islam yang sedang belajar di sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial Belanda yang sangat kurang memberikan pelajaran agama Islam. A. Hassan menyadari bahwa anak-anak muda yang tengah menuntut ilmu itu adalah calon pemimpin di masa datang yang perlu dibekali dengan pengetahuan agama yang memadai. A. Hassan memiliki tekad kuat untuk menarik para pemuda pelajar itu sangat kuat. Ia senantiasa menyempatkan diri untuk berbicara dengan para pemuda pelajar itu. Ditundanya pekerjaan yang sedang dikerjakannya, baik sedang mengoreksi buku atau sedang menyusun tafsir, bercakap-cakap dengan para pemuda calon pemimpin umat itu dianggapnya lebih penting.¹³

Beberapa tokoh yang lahir dari model kaderisasi ini adalah: *pertama*, Mohamad Natsir. Menurut Akh. Minhaji, "*among the most significant impact of Hassan's reform mission can be seen in the career of*

¹¹ Ini yang disebut Yudi Latief sebagai genealogi inteligensia muslim Indonesia. lihat Yudi Latif, "The Muslim Intelligentsia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century," 2004, <https://doi.org/10.25911/5d7635934da2b>.

¹² Berawal dari perdebatan tentang masalah-masalah furu, Tuan A. Hassan kemudian terlibat dalam perdebatan yang lebih substansial dan menyangkut masalah dasar perumusan suatu hukum Islam (ushul); bagaimana bersikap terhadap sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, Sunnah, ijma dan qiyas). Lihat Akh Minhaji, "Islamic Reform in Contest: Ahmad Hassan and His Traditionalist Opponents," *Studia Islamika* 7, no. 2 (2000): 88, <https://doi.org/10.15408/sdi.v7i2.710>.

¹³ M Natsir, *Pesan Perjuangan Seorang Bapak: Percakapan Antar Generasi*, ed. oleh Ahmad Watik Pratiknya (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia: Laboratorium Dakwah, 1989), 26-29.

Mohammad Natsir."¹⁴ Memang, di antara murid-murid sekolah menengah Belanda yang sering ke rumah A. Hassan untuk bertanya dan membahas soal-soal agama Islam adalah tokoh Masyumi yang dilahirkan di Alahan Panjang Sumatra Barat pada 17 juli 1908 tersebut. Natsir adalah anak seorang pegawai pemerintah. Ia tinggal di Bandung sejak tahun 1927 untuk melanjutkan studinya pada AMS (*Algemene Middelbare School*, atau setingkat SMA), setelah menyelesaikan sekolah dasarnya di HIS (*Hollandsch Inlandsch school*) dan sekolah menengah pertamanya di MULO (*Meet Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Minangkabau.¹⁵

Di Bandung, minat Natsir terhadap agama semakin tinggi. Pada tahun 1929 ia mulai mengajar agama Islam di HIK (*Hollands Inlandsche Kweekschool*; sekolah guru) dan MULO. Selain itu ia berusaha memperdalam agamanya dengan turut serta secara teratur mengikuti shalat jum'at dan pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh PERSIS serta mengikuti pelajaran agama di kelas khusus yang diadakan oleh A. Hassan untuk para pemuda pelajar yang sedang belajar di berbagai sekolah milik pemerintah Belanda. Inilah, menurut Akh. Minhaji, yang menjadi daya tarik tersendiri dari A. Hassan:

*Hassan was always ready to discuss any problem with his students and respected any new idea expressed by them. If the students had certain religious questions, he did not give the answers directly: instead he asked the students to solve the problems by searching for the answers in the available reference sources, written mostly in Arabie and English. All of this was quite different from the common approach of his peers, who always determined the answers to certain problems and set the books that the students should read.*¹⁶

¹⁴ Akh Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia:(1887-1958)* (Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), 339.

¹⁵ Moehammad Natsir telah mengenal ajaran-ajaran kelompok pembaharu sejak kecil. lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1985), 100.

¹⁶ Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia*, 340.

Natsir adalah orang yang terlibat dalam proses kaderisasi di bawah bimbingan A. Hassan langsung. Selain itu Natsir juga terlibat dalam Jong Islamieten Bond (JIB) cabang Bandung di bawah bimbingan Agus Salim. Natsir sendiri menceritakan bagaimana ia mengalami proses kaderisasi di bawah tangan dingin Tuan A. Hassan:

Ada beberapa pengalaman pribadi yang menarik tentang cara-cara yang khas Tuan Hassan... Saya belajar dengan berkunjung ke rumahnya di Bandung. Kalau saya datang ke tempatnya, dia hampir selalu sedang asyik menulis. Biasanya menulis tafsir Al-Quran. Karena dia sedang sibuk, maka saya balik keluar kamar. Ketika ia melihat, ia berseru memanggil: "Natsir..., jangan keluar. Duduklah." Jawab saya: "Tuan kan sedang bekerja." "Ya..., duduklah," katanya. Maka, mulailah saya "berdebat" dengan beliau. Biasanya sejak habis ashar sampai maghrib. Apa yang saya maksud dengan berdebat itu memang benar-benar berdebat. Saya membawa permasalahan lalu kita kaji... Kalau saya tidak dapat memecahkan, maka kepada saya dibawakannya sejumlah buku untuk dipelajari. Pada pertemuan berikutnya saya musti dapat menguraikan jawaban permasalahan yang diajukan. Demikian seterusnya cara Tuan Hassan mengajar saya."¹⁷

Di bawah bimbingan A Hassan dan Agus Salim, Natsir menjadi pribadi yang berhasil memadukan sisi intelektualitas Islam dan Barat. Hasilnya, ia pernah menduduki berbagai jabatan penting, antara lain Ketua Pusat Pimpinan PERSIS, Ketua Partai Islam Indonesia (PII) Cabang Bandung pada zaman kolonial Belanda, Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Perdana Menteri RI, Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), di samping kedudukannya sebagai Wakil Presiden Mu'tamar Al-Alam Al-Islami dan anggota Majelis Ta'sisi Rabithah Al-Alam Al-Islami.¹⁸

¹⁷ Natsir, *Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, 28.

¹⁸ Yusril Ihza Mahendra, "Combining Activism and Intellectualism: The Biography of Mohammad Natsir (1908-1993)," *Studia Islamika* 2, no. 1 (1995): 158-165, <https://doi.org/10.15408/sdi.v2i1.844>.

Kedua, KHM. Isa Anshary, seorang ulama dan politikus kelahiran Maninjau Sumatera pada 1916, yang pernah menjadi Ketua Umum Pusat Pimpinan PERSIS (1948-1960). Karir politik Isa Anshary diawali menjadi pemimpin Partai Masyumi wilayah Jawa Barat, dan pada tahun 1956 ia menjadi Pengurus Pusat Masyumi. Ia juga menjadi anggota Fraksi Masyumi dalam Konstituante Republik Indonesia hasil Pemilu 1955. Pada masa itu, elite-elite puncak PERSIS masuk dan aktif dalam gelanggang politik praktis. Peranan menonjol yang dilakukan elite-elite PERSIS dalam Masyumi adalah perjuangan memenangkan ideologi Islam berhadapan vis-à-vis dengan komunisme. PERSIS menjadi corong perlawanan terhadap paham komunisme. Dalam kaitan ini, Isa Anshary membentuk "Front Anti Komunis" pada pertengahan November 1954. Kantor PERSIS pun dijadikan markas Front Anti Komunis.

Sebagaimana dinyatakan oleh Federspiel, "*Isa Anshary provided leadership and a point of view, just as Ahmad Hassan had done in the pre war years.*"¹⁹ Sejak tahun 1940, Isa Anshary telah menjadi anggota Pimpinan Pusat PERSIS, sehingga tidak aneh jika kemudian ia berperan penting dalam proses reorganisasi ini setelah dibubarkan Jepang pada 1942. Ia juga yang kemudian menjadi ketua umum dari organisasi yang kembali diaktifkan itu. Di samping itu, ia pun turut menjadi konseptor rancangan *Qanun Asasi-Qanun Dakhili* (AD/ART) PERSIS yang baru, serta Manifest Perjuangan PERSIS.²⁰ Menurut Akh. Minhaji, pengaruh A. Hassan terhadap Isa Anshary sangatlah fundamental:

A study of his thought in this area will certainly give the impression that Anshary adopted Hassan's principal religious ideas. He believed that Muslims have been too much influenced by Western ways of thinking to the extent that they live in an era of "modern jihiliyyah."

¹⁹ Federspiel, *Persatuan Islam*, 124.

²⁰ Pepen Irpan Fauzan, "Perumus Manifest Perjuangan Persatuan Islam," *Jurnal Studi Islam: STAI PERSIS GARUT* 1, no. 2 (2016): 149-71.

*i.e. a way of life which features material progress but lacks spiritual values. What man needs, Anshary says in one of his works. "is an absolute guide" and such a guide is provided by Islam, with its unchanging beliefs in God, its shari'ah and its ummah.*²¹

Di antara murid-murudnya yang lain yang kemudian menjadi ulama besar dan memimpin pesantren-pesantren besar, adalah Ustadz Abdul Qadir Hassan, putra tertua A. Hassan, yang memimpin pesantren PERSIS di Bangil dan pengasuh majalah *Al-Muslimun* serata pernah menjadi ketua Majelis Ulama PERSIS (sekarang Dewan Hisbah PP. PERSIS). Demikian pula Ustadz K.H.E Abdurrahman, Pemimpin pesantren PERSIS Bandung dan Ketua Umum Pusat Pimpinan PERSIS (1962-1983) yang juga pengasuh majalah *At-Taqwa* dan majalah *Risalah* adalah murid A. Hassan yang melanjutkan mengelola pesantren PERSIS di Bandung sejak ditinggalkan pindah oleh A. Hassan ke Bangil pada tahun 1941.

Masih terdapat ulama-ulama lainnya yang merupakan buah dari proses kaderisasi A. Hassan, di antaranya K.H. O. Qomaruddin Shaleh, dosen dan pernah menjadi Wakil Ketua Pusat Pimpinan PERSIS; K.H.M. Rusyad Nurdin, dosen di beberapa perguruan tinggi, ulama terkenal, dan pernah menjadi Wakil Ketua Pusat Pimpinan PERSIS dan Ketua DDII perwakilan Jawa Barat; Fakhroeddin Al-Khahiri, ulama besar teman seperjuangan Moehammad Natsir pada saat berguru kepada A. Hassan; dan masih banyak lagi ulama-ulama di daerah yang menjadi guru, ulama, mubaligh dan aktivis dalam berbagai organisasi keislaman, terutama para santri PERSIS angkatan pertama yang menjadi pelopor dan penggerak tegaknya Qur'an-Sunnah di tempat asal mereka.²²

²¹ Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia*, 348.

²² Pembahasan terkait pengaruh A. Hassan terhadap murid-muridnya, baik yang menjadi tokoh Nasional maupun lokal, lihat Minhaji, 338-358.

Dalam kaitan inilah, Mohamad Natsir menegaskan bahwa A. Hassan adalah tokoh istimewa dengan segala ajaran dan didikan terhadap kader-kadernya:

“Suatu Keistimewaan dalam diri A. Hassan ialah... Beliau tidak mau menyuapkan sesuatu ibarat makanan kepada kader-kadernya, tetapi haruslah berbuat sendiri dengan penuh tanggungjawab. Semboyannya bila seorang bayi selalu dipangku saja, dia tidak akan pandai berjalan. Kalau beliau menyetujui sesuatu, hendaklah kita pandai meyelesaikannya. Beliau mendidik kadernya berani bertanggungjawab dan sanggup berjuang menghadapi masalah-masalah, walaupun bagaimana rumitnya. Inilah yang dinilainya baik bagi angkatan pemuda Islam. Kami yang berada di dekat beliau selalu diteliti dengan kuat, disiplin dengan ketat, dan diberi tanggungjawab masing-masing. Jika kami memajukan masalah agama, beliau tidak menjawabnya langsung, tapi disuruhnya mencari dalam kitab-kitab yang ada dalam berbagai bahasa, terutama bahasa arab dan inggris. Saya diberi tugas tertentu, demikian juga Fakhrudin al-Kahiri, Abdurrahman, Qamaruddin Saleh, Isa Anshari dan lainnya.”²³

MUALLIMIN PESANTREN PERSIS: MODEL PENDIDIKAN KADER

Perkembangan intensif kaderisasi PERSIS secara khusus dimulai pada era kepemimpinan KH. E. Abdurrahman, murid A. Hassan. Sebagai Ketua Umum PERSIS Periode 1963-1984, ia menginginkan organisasinya itu kembali ke khittahnya bergerak di dunia pendidikan dan dakwah dalam arti yang ia pahami, yaitu mendidik calon pendakwah dan guru agama; lalu mereka terjun langsung sebagai da'i dan pengajar. Visi ini ia jelaskan dalam Pidato Pembukaan pada Mu'akhat PERSIS 16 Januari 1981 yang diberi judul *“Kita Sekalian Sebagai Pelengkap.”* Abdurrahman menjelaskan, yang

²³ Natsir, *Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, 28-29.

dimaksud menjadi “pelengkap” adalah bahwa PERSIS tidak perlu ikut terjun langsung dalam kegiatan politik, karena tugas PERSIS adalah mempersiapkan “agama” bagi bangsa ini, yaitu dengan berdakwah dan mengajar. Gambaran visinya ini secara tegas terdapat dalam Tafsir Qanun Asasi PERSIS yang disusun atas supervisi E. Abdurrahman, bahwa:

“Persatuan Islam lebih merupakan lembaga pendidikan dari pada Jam’iyyah dalam arti siyasah (politik praktis). Persatuan Islam adalah pesantren sebelum menjadi Jam’iyyah. Karena itu sifat pesantren tidak akan lepas dari Persatuan Islam, sejak dulu, sekarang dan insya Allah pada masa-masa yang akan datang... Bila sifat pesantren telah tiada, maka berarti khiththah perjuangan Persatuan Islam yang semula dan asli telah hilang. Demikian, dengan sendirinya, Persatuan Islam itu sendiri akan lenyap dan tidak perlu ada lagi.”²⁴

Bentuk kongkrit visi ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan organisasi yang ia ambil. Sepanjang kepemimpinannya, program-program yang riil dikerjakan berkisar pada dua hal: penyelenggaraan *tabligh* dan mengelola pesantren. Pada bidang *tabligh*, Pimpinan Pusat (PP) PERSIS membuka kursus-kursus bagi calon *muballigh* (penceramah agama) yang programnya dinamakan “*Tamhidul Muballighin*” (Persiapan bagi Para Muballigh). Dalam kursus ini, para calon muballigh diajarkan pengetahuan-pengetahuan dasar Islam meliputi akidah, ibadah, adab, akhlak, dan teknik-teknik pidato.²⁵

Kursus *Tamhidul Muballighin* adalah upaya kaderisasi PERSIS yang penting. Alumni-alumni *Tamhidul Muballighin* ini kemudian diberi tugas untuk menjadi muballigh di kampungnya masing-masing. Umumnya mereka memang menjadi imam mesjid dan menjadi muballigh-muballigh lokal di daerahnya masing-masing.

²⁴ *Tafsir Qanun Asasi-Qanun Dakhili Persatuan Islam*, 7-8.

²⁵ Howard M. Rederspiel, “Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited,” *Al-Jami’ah* XII, no. 64 (18 Juli 2008): 50-51, <https://doi.org/10/small.jpg>.

Selebihnya, merekalah yang kemudian mendirikan cabang-cabang baru PERSIS di daerah-daerah. Namun, karena peserta Tamhidul Muballighin ini sebagian besar berasal dari daerah Priangan (Garut, Tasik, Ciamis, Bandung, Cianjur, Bogor, Sukabumi, dan sekitarnya), maka perkembangan PERSIS di masa E. Abdurrahman ini pun hanya terkonsentrasi di Jawa Barat.²⁶

Dalam bidang pendidikan, lembaga pendidikan yang diselenggarakan E. Abdurrahman yang kemudian dikembangkan ke berbagai daerah oleh murid-muridnya adalah "pesantren". Pemilihan lembaga pendidikan jenis ini bagi PERSIS sungguh unik:

"Konsep 'pesantren' yang diambil dari khazanah pengetahuan Islam klasik (tradisional) dapat dipadukan dengan sistem pendidikan modern dari Barat (Belanda). Sebuah modifikasi yang unik. Orientasinya tetap 'pesantren-centris', yakni *li yatafaqqahu fi al-dien* (untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman dan mencetak kader ulama), tetapi tidak apriori terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari Barat."²⁷

Sebelum kemerdekaan (1927-1942), PERSIS sesungguhnya memiliki lembaga pendidikan "umum" yang dipimpin M. Natsir. Lembaga pendidikan yang diberi nama Pendidikan Islam (Pendis) ini menyelenggarakan pendidikan HIS, MULO, dan *Kweekschool*. Setelah kemerdekaan, Natsir lebih memilih dunia politik daripada melanjutkan karir pendidikannya hingga Pendis yang didirikannya hanya menjadi tinggal bagian dari sejarah.²⁸ Sementara itu, E. Abdurrahman sebagai pemegang otoritas organisasi tidak pula

²⁶ Bachtiar, *Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Politik Persis*, 317.

²⁷ Endang S. Hafidz dkk., *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda PERSIS* (Bandung: Granada, 2005), xx.

²⁸ Tentang Pendis yang didirikan oleh A. Banama dan dikembangkan M. Natsir, lihat Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP. Pemuda Persatuan Islam dan Persis Press, 2000), 59-60.

kelihatan berkeinginan menghidupkan kembali Pendis. Ia lebih memilih melanjutkan pendidikan pesantren yang didirikan A. Hassan tahun 1936 di Bandung dan kemudian 1939 di Bangil. Hampir bisa dipastikan bahwa minat Abdurrahman pada pesantren, karena dianggap lebih sesuai dengan visinya di atas.

Selain itu, pesantren yang ia pimpin pun sedapat-dapatnya dijauhkan dari hubungan-hubungan dengan politik dan formalitas pemerintah. Misalnya, ia melarang santrinya mengikuti ujian persamaan, baik di tingkat Tsanawiyah (SLTP) maupun Muallimin (SLTA). Ia juga melarang santrinya untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum maupun agama, sekalipun ia sendiri mengajar agama di IKIP Bandung dan UNISBA (Universitas Islam Bandung). Larangan itu dikeluarkan karena ia ingin agar santri-santrinya kelak menjadi muballigh dan guru yang siap ditempatkan ke mana saja termasuk ke daerah-daerah pedalaman²⁹ sehingga tidak memerlukan ijazah formal dari ujian persamaan.³⁰ Demikian pula bersekolah di perguruan tinggi. Ia tidak menganjurkan berkuliah karena dikhawatirkan setelah lulus tidak mau lagi keluar masuk kampung menjadi muballigh.

Dari dua kebijakan program pokok Persatuan Islam di atas, tampak bahwa E. Abdurrahman berusaha untuk menyiapkan kader-kader otentik menurut versinya, yaitu tidak terpengaruh oleh dunia luar, untuk kemudian disiapkan menjadi kader-kader muballigh dan pendidik. Namun, pada saat yang sama, secara langsung ataupun tidak, ia mengisolasi PERSIS dari pergaulan, terutama dengan lembaga-lembaga negara dan pergaulan internasional.

"Melalui langkah-langkahnya ini, sebetulnya apa yang diharapkan oleh E. Abdurrahman? Inilah poin yang seringkali didiskreditkan dan disalahartikan. Banyak yang melihatnya sebagai sebuah tindakan

²⁹ Bachtiar, *Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Politik Persis*, 318.

³⁰ Hamdani Hamid, *Persatuan Islam dan Usaha Pembaharuan Pendidikan* (Bandung: Sumber Prima, 1993), 97-98.

jumud dan mundur. Namun, di balik semua kebijakan yang dilakukannya di masa berikutnya baru terlihat efek dari kebijakan yang diambilnya ini terhadap perkembangan PERSIS pada masa-masa berikutnya.”³¹

Pada tahun 1983 ketika E. Abdurrahman meninggal dunia, banyak di antara muridnya yang berhasil membuka pesantren-pesantren Persatuan Islam dengan meniru model Pesantren Persatuan Islam Bandung yang dipimpinnya. Beberapa yang menonjol di antaranya adalah: Aminah Dahlan (bersama suaminya Syihabuddin) mengembangkan pesantren PERSIS di Tarogong dan Garut Kota,³² Ali Ghazaly di Cianjur (Kota), O. Syamsudin di Padalarang, Aminullah di Tasikmalaya, E. Saefuddin di Rancaekek Bandung, Eman Sar'an di Jakarta dan di beberapa tempat lain, seperti di Majalengka, Sumedang, Ciamis, Bogor, dan Sukabumi.³³

Bila E. Abdurrahman memilih untuk ‘mengisolasi’ pesantren dan santri-santrinya dari dunia luar, Abdul Kadir Hassan (selanjutnya disebut A.K. Hassan) yang mengelola Pesantren PERSIS di Bangil terlihat lebih terbuka. Ia memberi kebebasan kepada murid-muridnya untuk melanjutkan sekolah ke mana saja. Bahkan, ketika Natsir mendapat *privilage* untuk merekomendasikan calon-calon mahasiswa Indonesia berkuliah di Timur Tengah, PERSIS Bangil mengambil kesempatan itu. Banyak murid-murid A.K. Hassan yang didorong untuk studi di Timur Tengah. Bahkan anaknya, Ghazi Abdul Kadir,

³¹ Bachtiar, *Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Politik Persis*, 322-323.

³² Sekitar tahun 1975-an E. Abdurrahman setuju untuk melepaskan salah seorang murid terbaiknya, Aceng Zakaria yang asli Garut, untuk ikut mengembangkan pesantren PERSIS di Garut. A. Zakaria inilah yang kemudian menjadi ikon pesantren PERSIS di Garut hingga kemudian pesantren PERSIS di Garut berkembang begitu pesat.

³³ Tiar Anwar Bachtiar, *Sejarah Pesantren Persis, 1936-1983* (Jakarta: Pembela Islam, 2012); Sebagai perbandingan sejarah perkembangan jaringan pesantren di Jawa Barat, lihat Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khoirul Fata, “Jaringan Pesantren di Jawa Barat Tahun 1800-1945: Critical Review atas Disertasi ‘Jaringan Pesantren di Priangan 1800-1945’ Karya Ading Kusdiana,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 17, no. 1 (2019): 139-168.

dan keponakannya, Hud Abdullah Musa, didorong juga untuk bersekolah ke Timur Tengah. Kebijakan inilah juga yang membuat resonansi Jaringan PERSIS Bangil lebih luas dibandingkan Jaringan PERSIS Bandung yang kelihatan stagnan dan terbatas di Jawa Barat.³⁴

Pada era kepemimpinan KH. A. Latief Muchtar (1984-1997) dan masih berlangsung hingga sekarang, Pesantren PERSIS pada umumnya telah terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Kondisi ini, menurut Rohman dan Saebani,³⁵ menjadi bagian penting terjadinya perubahan pola pendidikan yang eksklusif menjadi inklusif. Dengan demikian, kepercayaan publik kepada lembaga pendidikan yang dikelola PERSIS semakin tinggi mengingat lulusannya sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, sehingga pesantren PERSIS tidak hanya memberi kontribusi pada pendidikan nasional, melainkan juga pada proses santrinisasi masyarakat Muslim Indonesia.³⁶

Dengan konsep kelembagaan seperti itu, Pesantren PERSIS berhasil melahirkan ribuan kader Muslim yang tidak hanya paham syari'at, tetapi juga "gaul" dengan perkembangan zaman. Bila pada organisasi modernis semisal Muhammadiyah pernah mengalami krisis kader ulama,³⁷ PERSIS 'kelebihan' kader ustadz (sebutan khas ahli agama dalam PERSIS), walau hanya sedikit yang naik ke pentas nasional, sebut saja misalnya K.H. Latief Muchtar, MA (w. 1997), K.H.

³⁴ Bachtiar, *Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Politik Persis*, 324-325.

³⁵ M. Taufiq Rahman dan Beni Ahmad Saebani, "Membangun Gerakan Inklusivisme Model Jamaah Persatuan Islam," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 1 (9 Juli 2018): hlm. 69, <https://doi.org/10.15575/jt.v1i1.2488>.

³⁶ Bandingkan dengan Toto Suharto, "Kontribusi Pesantren Persatuan Islam Bagi Penguatan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Millah: Jurnal Studi Agama* 11, no. 1 (2011): 109-33, <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art5>.

³⁷ Muh Isnanto, "Gagasan Dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama (Studi Kasus Tentang Ulama Di Muhammadiyah)," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 2 (2018): 95-108, <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1380>.

Endang Saefudin Anshary, MA (w. 1995), Prof. Syafiq Mughni, KH. Aceng Zakariya, dan sebagainya.

Konsep kaderisasi PERSIS lebih tampak pada pelembagaan pendidikan Muallimin. Sebagai perbandingan pada organisasi Islam lainnya adalah pendidikan kader Muallimin pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Persyarikatan Muhammadiyah. Hasil penelitian Maarif, di antara faktor pendukung NU dan Muhammadiyah dapat bertahan lama hingga sekarang—bahkan dalam perkembangannya mampu menjadi dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia—hal ini tidak lepas dari peran kader penerus dari Madrasah Muallimin kedua organisasi tersebut. Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Yogyakarta yang melahirkan kader Muhammadiyah. NU juga memiliki salah satu madrasah yang melahirkan kader-kader penggerak dalam organisasi tersebut, seperti Madrasah Muallimin Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur.³⁸

Demikian juga pada PERSIS. Pendidikan Muallimin PERSIS sejak awal dirancang sebagai ‘kawah candradimuka’ untuk melahirkan kader PERSIS. Dalam sejarahnya, pendidikan Muallimin PERSIS telah melahirkan alumni-alumni yang menjadi tokoh masyarakat sebagai penggerak jam’iyyah. Dalam pelaksanaan pendidikannya, terdapat program-program khusus dalam menanamkan ideologi Islam pada santri-santrinya. Toto Suharto menjelaskan:

“Ideologi Islam kiranya dijadikan pegangan oleh Persatuan Islam dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Karena itu, dalam menentukan segala kebijakan kependidikannya, Pesantren Persatuan Islam senantiasa berpedoman kepada ideologi Islam ini, termasuk di dalam menentukan tujuan dan kurikulum pendidikannya. Bagi Pesantren Persatuan Islam, ideologi Islam

³⁸ Ahmad Ma’arif, “Sistem Pendidikan Kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta Dan Madrasah Muallimin Bahrul Ulum Jombang Jawa Timur” (Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/27403/>.

adalah sistem kepercayaan, nilai, atau pandangan serta pemikiran yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Ideologi Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah inilah yang dipegangi Pesantren Persatuan Islam."³⁹

Pengembangan kurikulum pendidikan kader Muallimin PERSIS dilakukan dengan, *pertama*, melalui kegiatan pendidikan. Yakni, pendidikan kader Muallimin dengan penanaman pengetahuan agama dan umum, keterampilan mengajar dan berorganisasi, dan sikap santri sesuai kebutuhan. Terkait pendidikan kader ini, pada pendidikan Muallimin ada mata pelajaran khusus kejam'iyahan/ke-PERSIS-an. Tentu, ini termasuk salah satu model penanaman ideologi jam'iyah PERSIS pada santri Muallimin PERSIS.

Kedua, penugasan kader dengan pemberian kesempatan kepada santri untuk melibatkan diri pada kegiatan organisasi sebagai pelatihan pematangan dan pendewasaan. Biasanya pada keumuman Pesantren PERSIS, santri Muallimin tingkat awal akan dilatih melalui program LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan). Dalam konteks ini, santri putra Muallimin menjadi aktivis *Rijalul Ghad* (RG, yang bermakna pemimpin masa depan), sedangkan santri putri menjadi aktivis *Ummahatul Ghad* (UG, yang bermakna pemimpin perempuan masa depan). Kedua organisasi ini dalam lingkungan PERSIS, menurut Darmadi, "bertujuan untuk menggodok mental calon pemimpin yang siap berorganisasi dalam masyarakat."⁴⁰

Ketiga, program khusus *khidmah Jam'iyah*. Dalam Peraturan Bidang Tarbiyah PP PERSIS Tentang Pendidikan Menengah Kepesantrenan PERSIS Tahun 2015, pada Pasal 4 ayat (6) disebutkan bahwa pada Pendidikan Muallimin diadakan Program Latihan

³⁹ Toto; Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam* (Fataba Press, 2013), 235.

⁴⁰ Dadi Darmadi, "Pesantren Persis Pajagalan Bandung: dengan al- Qur'an dan Sunnah Mencetak Kader Ulama Harapan Umat," *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan* 3, no. 1 (1999): 56.

Khidmat Jam'iyah (PLKJ).⁴¹ Program ini mewajibkan setiap santri Muallimin PERSIS untuk mengabdikan diri dan ilmunya di tengah masyarakat. Pengabdian santri ini biasanya berbentuk latihan untuk mengajar, berdakwah dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat umum.

Lembaga ini merupakan lembaga kader bagi PERSIS, yang bertujuan mencetak muballigh-muballigh Persatuan Islam yang akan menyampaikan dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Kelebihan yang dimiliki santri alumni Muallimin Pesantren PERSIS adalah bahwa mereka memiliki sikap militansi yang lebih, dibanding calon generasi yang ada di Ormas-ormas lain semisal Muhammadiyah atau NU. Kelebihan militansi ini utamanya disebabkan karena adanya dimensi doktrin kependidikan, yaitu bahwa Persatuan Islam telah menjadikan lembaga pesantrennya sebagai wasilah untuk menyebarkan doktrin-doktrin PERSIS.⁴²

PELEMBAGAAN KADERISASI PERSIS KONTEMPORER: TINJAUAN KRITIS

Kader adalah hasil dari proses kaderisasi. Tidak mungkin ada kader tanpa proses kaderisasi. Keduanya merupakan bagian penting dari sistem perkaderan. Yakni, seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi pada sebuah organisasi. Kaderisasi, dengan demikian, juga berfungsi untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten dan/atau memiliki loyalitas terhadap organisasi.

⁴¹ *Pedoman Jamiyyah dan Kaifiyat Kerja PERSIS 2015-2020* (Bandung: PP Persis, 2015), 114.

⁴² Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik*, 235.

Dalam *Qanun Asasi* (anggaran dasar) dan *Qanun Dakhili* (anggaran rumah tangga) PERSIS, istilah kader muncul sebanyak tujuh (7) kali. Pada Pasal 55 terkait Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) di luar negeri, disebutkan dalam ayat (2) bahwa Pimpinan Cabang Istimewa dibentuk untuk mengkoordinasikan jihad Jam'iyah PERSIS di luar negeri, membina *kader-kader PERSIS* di luar negeri, dan membuka jaringan internasional terutama di negara bersangkutan. Istilah kader juga muncul dikaitkan dengan Bagian Otonom (Batom) PERSIS. Pada Pasal 61, ayat (1) Bagian Otonom adalah bagian dari Jam'iyah PERSIS *sebagai kader dan pelopor perjuangan* PERSIS yang diberi hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri bidang kegiatannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pimpinan Pusat. Namun demikian, Batom Persatuan Islam Isteri (PERSISTRI) tidak disebut kader dalam *Qanun*. PERSISTRI hanya disebut sebagai Pelopor Perjuangan PERSIS di bidang kewanitaan (Pasal 63, ayat 1). Lain halnya dengan Batom lainnya. Pada Pasal 64, ayat (1) Pemuda PERSIS dibina oleh PERSIS untuk menjadi kader PERSIS; Pasal 65 ayat (1) Pemudi PERSIS diadakan dan dibina oleh PERSIS untuk menjadi kader PERSISTRI; Pasal 66 ayat (1) Hima (Himpunan Mahasiswa) PERSIS diadakan dan dibina oleh PERSIS untuk menjadi kader PERSIS; Pasal 67 ayat (1) Himi (Himpunan Mahasiswi) PERSIS diadakan dan dibina oleh PERSIS untuk menjadi kader PERSISTRI.⁴³

Jadi, yang dimaksud kader dalam *Qanun* PERSIS adalah generasi pelanjut yang secara organisasional terangkum dalam wadah Pemuda, Pemudi, Hima, dan Himi PERSIS. Hal ini lebih ditegaskan dalam Penjelasan *Qanun* (QA-QD) PERSIS. Terkait dengan PCI di luar negeri yang juga diharuskan membina kader, maksud kader di sana adalah para mahasiswa PERSIS yang sedang kuliah di luar negeri: "Pada jajaran struktur tingkat Pimpinan ditambahkan struktur

⁴³ QA-QD PERSIS 2015-2020 (Bandung: Sekretaris PP PERSIS, 2015), 42, 44, 45 dan 46.

Pimpinan Cabang Istimewa untuk menghimpun para mahasiswa, mahasiswi dan potensi-potensi kader yang berdomisili di luar negeri dalam wadah Jam'iyah dalam upaya pembentukan kader PERSIS.”⁴⁴ Dengan demikian, konsep kader dalam Qanun PERSIS lebih bersifat fragmentatif kepada kaum mudanya, tidak mencakup keseluruhan.

Agar proses kaderisasi ini dapat terjaga kontinuitasnya, maka dibutuhkan pelembagaan kaderisasi. Ada dua dimensi utama yang penting dicermati dalam rangka melakukan pelembagaan kaderisasi, yakni dimensi formal dan dimensi politis. Dimensi formal berkenaan dengan soal bahwa internalisasi nilai-nilai dan arah perjuangan organisasi butuh dibakukan melalui instrumen program pendidikan dan pembentukan lembaga yang khusus mengelola kaderisasi. Dengan kata lain, ini berkenaan dengan pembentukan sistem formal kaderisasi. Sedangkan dimensi politis menempatkan kaderisasi dalam makna ruang politik, yakni ruang penempatan kader dalam struktur kepengurusan organisasi, baik di tingkat daerah (Tasykil PD/PW) hingga tingkat pusat (Tasykil PP)—yang dalam prosesnya tidak tertutup kemungkinan tarik-menarik atau kompetisi berbagai kepentingan faksi-faksi internal jam'iyah.

Pada Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) PERSIS Tahun 2015-2020, Pasal 5 disebutkan bahwa Ketua Bidgar Pembinaan dan Pengembangan SDI—yang hanya ada di tingkat Pusat—bertugas: (a) menyusun pola pembinaan dan kaderisasi anggota; (b) mengoordinasikan dan atau melaksanakan pembinaan dan kaderisasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota; dan (c) mensinergikan pola kaderisasi bagian otonom.⁴⁵ Sumber daya insani sebagai calon anggota atau calon kader dalam jam'iyah akan menjalani proses seleksi yang disebut kaderisasi berupa pendidikan yang berjenjang dan

⁴⁴ *Penjelasan QA-QD PERSIS 2015-2020* (Bandung: Sekretaris PP PERSIS, 2018), 71.

⁴⁵ *Pedoman Jamiyyah dan Kaifiyat Kerja PERSIS 2015-2020*, 31-32.

berkesinambungan agar memahami platform PERSIS, sejarah perjuangan PERSIS, arah perjuangan dan strategi perjuangan politik yang digunakan oleh jam'iyah PERSIS, serta memiliki militansi yang tinggi pada jam'iyah tersebut. Salah satu caranya, yang merupakan faktor kunci, yaitu dengan penanaman ideologi.

Adapun jenis pembinaan anggota dibagi empat tingkatan: (1) *Tafhim*, diperuntukkan bagi calon anggota untuk memahami jam'iyah PERSIS; (2) *Takwin*, diperuntukkan bagi anggota yang telah mengikuti jenjang *Tafhim* untuk membentuk komitmen kejam'iyahan (*iltizam*); (3) *Tahdzib* diperuntukkan bagi anggota yang telah mengikuti jenjang *Takwin* untuk pengayaan dan pemeliharaan komitmen kejam'iyahan; dan (4) *Tautsiq*, diperuntukkan bagi anggota yang telah mengikuti jenjang *Tahdzib* untuk penguatan, pengayaan dan pendalaman materi-materi kejam'iyahan.

Di samping itu, ada jenis pembinaan khusus, *Tadribul Mudlarib*, yaitu jenis pelatihan bagi calon pelatih (*training for trainers*). Pelatihan ini dibagi pada empat *marhalah* (tingkatan), yaitu: (1) *marhalah ula*, untuk mempersiapkan tenaga pelatih pada tingkat *Tafhim*; (2) *marhalah tsaniyah*, untuk mempersiapkan tenaga pelatih pada tingkat *Takwin*; (3) *marhalah tsalisah*, untuk mempersiapkan tenaga pelatih pada tingkat *Tahdzib*; dan (4) *marhalah rabi'ah*, untuk mempersiapkan tenaga pelatih pada tingkat *Tautsiq*.⁴⁶

Pola kaderisasi ini tampaknya masih *trial-and-error*, belum sistemik. Di samping perangkat instrumen kaderisasinya yang belum mapan, juga infrastruktur pelatihan juga belum memadai, baik di tingkat pusat apalagi di tingkat daerah. Komitmen untuk melaksanakan kaderisasi tidak cukup dengan hanya mencantumkannya dalam *Qanun* dan Pedoman Jam'iyah. Ini berikutnya harus diterjemahkan dalam program-program jihad Jam'iyah dalam setiap periode dan tingkatan kepengurusan.

⁴⁶ *Pedoman Jamiyyah dan Kaifiyat Kerja PERSIS 2015-2020*, 33-35.

Komitmen dan keseriusan jam'iyah dalam melakukan kaderisasi harus bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang kongkret dan dipahami oleh anggotanya dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, setidaknya komitmen dan tingkat keseriusan itu dapat diukur dengan mencermati beberapa indikator sebagai berikut: (a) Sistem Kaderisasi, berupa orientasi pengkaderan dan kesesuaian materi kaderisasi dengan platform dan program jihad PERSIS, serta mekanisme kaderisasi; (b) Kelembagaan, berupa keberadaan lembaga kaderisasi dalam tiap tingkatan kepengurusan jam'iyah, penjaluran kader pasca kaderisasi, serta adanya *trainer* yang melaksanakan kegiatan pengkaderan. Kaderisasi itu sendiri berdimensi: (a) Kuantitas, berupa jumlah orang yang mengikuti pengkaderan serta jumlah pelatih (*mudlarib*); dan (b) Kualitas, berupa tingkat kapasitas keahlian peserta kaderisasi dan karya atau prestasi peserta pasca kaderisasi. Hal ini juga terkait dengan alokasi waktu yang dialokasikan bagi program-program pengkaderan, serta alokasi dana yang dianggarkan untuk program-program pengkaderan jam'iyah tersebut.

Dalam hal ini, sistem dan pola perkaderan PERSIS ini tidak sebanding dengan, misalnya, Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM). Sebagai sebuah sistem, unsur-unsur yang terkandung dalam Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) adalah tujuan perkaderan Muhammadiyah, arah perkaderan Muhammadiyah, profil kader Muhammadiyah, jenis dan bentuk perkaderan, struktur penjenjangan kader, kurikulum perkaderan, dan pengorganisasian perkaderan. Sebagai sebuah sistem dan kesatuan yang utuh, maka Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) berlaku menyeluruh bagi semua jajaran dan komponen Persyarikatan. Konsekuensinya, Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM) juga memuat atau mencakup

seluruh bentuk dan jenis kaderisasi dan pelatihan yang diterapkan di Muhammadiyah, baik secara vertikal maupun horizontal.⁴⁷

Sementara di tubuh jam'iyah PERSIS, sistem kaderisasinya masih belum terpolo secara utuh dan terpadu. Antara PERSIS dengan Batom, masing-masing mempunyai sistem dan pola perkaderan sendiri. Pada Hima/Himi PERSIS misalnya, ada pola penjenjangan kader dari mulai Kabah, Mekkah dan Madinah.⁴⁸ Sementara pada Pemuda PERSIS, sistem perkaderannya berjenjang masa ta'aruf (ma'ruf) dan jenjang *Tazwidu Fityanil Qur'an* (Tafiq). Tafiq merupakan ajang kaderisasi berjenjang bagi para Pemuda PERSIS. Secara historis, Tafiq merupakan buah pikir dari E. Abdurrahman. Pada awalnya Tafiq, sejak jaman Ustadz Yaman, diadakan untuk pembekalan kepada para Pemuda yang akan menjadi pengurus di Pimpinan Pusat. Biasanya sesudah muktamar dan tersusun kepengurusan, baru kemudian diadakanlah Tafiq, sebagai pembekalan terhadap para pengurus. Seiring dengan waktu pada masa kepengurusan 2005-2010, diadakan modifikasi terhadap Tafiq, yang semula hanya pembekalan pada tingkat pusat setelah muktamar, diubah menjadi training yang diadakan untuk semua pengurus dan calon pengurus pada semua jenjang baik tingkat PD Tafiq 1, PW Tafiq II dan PP Tafiq III.⁴⁹

“Kaderisasi merupakan salah satu agenda besar yang harus diperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh. Sebab, harus diakui secara jujur bahwa saat ini PERSIS mengalami kemacetan kaderisasi yang luar biasa serius yang menyebabkan lemahnya aktivitas PERSIS di semua lini perjuangannya. Secara garis besar kelemahan kaderisasi

⁴⁷ Ridwan Furqoni, “Studi Kritis Terhadap Sistem Perkaderan Muhammadiyah Sebagai Sistem Penyiapan Kader Muhammadiyah” (Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

⁴⁸ Tim Penyusun Bidang Kaderisasi PP Hima PERSIS, *Pedoman Kaderisasi, Pendidikan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Kader Hima PERSIS* (Bandung: Ulul Albab Publishing, 2019), 28-56.

⁴⁹ AM. Furqon, “Kaderisasi Pemuda Persis,” *Persis Jakarta* (blog), 26 November 2017, <http://persisjakarta.com/2017/11/26/kaderisasi-pemuda-persis-catatan-kecil-tafiq/>.

PERSIS ini menimpa dua penyangga utama gerakan PERSIS yaitu: kader pimpinan dan kader pemikir. Untuk merespon persoalan ini, maka PERSIS perlu menegaskan satu cetak biru program kaderisasi secara integrated yang melibatkan seluruh komponen perjuangan di lingkungan PERSIS.”⁵⁰

Berbagai renungan perlu dilakukan para aktivis PERSIS. Sebagai bentuk regenerasi dan suksesi, seharusnya kaderisasi adalah tentang bagaimana mempertahankan segala bentuk ajaran dan nilai sebuah organisasi (jam’iyyah). Namun, andai pun para kader penerus tidak kreatif melakukan inovasi-inovasi, hanya berfungsi sebagai *guardian*, tidakkah itu juga mencerminkan kader yang *jumud*? Gerakannya otomatis menjadi monoton. Perkembangan zaman—budaya masyarakat dan terutama peradaban—menuntut kader PERSIS terus berinovasi. Namun yang harus diperhatikan adalah: apakah inovasi dalam kaderisasi mendistorsi nilai-nilai yang dicita-citakan *founding fathers* PERSIS? Sebuah tantangan pemikiran (kritis-aplikatif) untuk para aktivis PERSIS.

Kader adalah pendukung yang telah menjadi anggota dari jam’iyyah yang ditentukan berdasarkan mekanisme rekrutmen yang berlaku di jam’iyyah. Mereka ini berikutnya akan diproyeksikan untuk tampil sebagai penggerak roda organisasi, baik sebagai pengelola atau pemimpin (tasykil) jam’iyyah, maupun untuk menjadi pejabat-pejabat publik yang direkomendasikan oleh jam’iyyah. Agar jam’iyyah dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka kader jam’iyyah harus terlebih dahulu bersepakat dengan garis ideologi dan aturan-aturan yang berlaku dalam jam’iyyah. Ini misalnya ditunjukkan dengan penerimaan terhadap *qanun* dan arah perjuangan jam’iyyah.

Konsekuensinya, saat bersamaan, jam’iyyah tidak dapat mentoleransi kader-kadernya yang secara fundamental tidak

⁵⁰ Dadan Wildan dkk., *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam* (Tangerang Selatan: Amana, 2015), 209.

bersepakat dengan kepemimpinan dan ide-ide perjuangan PERSIS, loyal kepada organisasi lain atau menolak untuk terlibat kerja dalam struktur jam'iyah. Namun demikian, setiap kader jam'iyah harus tetap terbuka bagi munculnya berbagai pandangan maupun inisiatif dari individu-individu anggota jam'iyah itu sendiri. Ini penting agar tidak terjadi stagnasi dalam jam'iyah. Artinya, jam'iyah sungguhpun dituntut untuk memiliki konsistensi ideologi dan format organisasi yang koheren dengannya, namun harus memperhatikan munculnya ide-ide dan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan obyektif yang ada.

Garis dan rentjana perdjuaan akan menjadi beku, kalau tidak ada kader (hawarijun) jang memotori berdjalannja garis rentjana perdjuaan itu. Kader (hawarijun) ialah orang-orang jang faham betul dasar sedjarah garis perdjuaan dan menganggap garis perdjuaan itu njawa dan kepunjaannja, dan siap sedia memperdjuaangkannja dengan penuh rasa tanggung djawab. Kebidjaksanaan pimpinan memilih kader, menempatkan dia pada tempat dan lapangan jang bersesuaian dengan ketjakapan dan kodrat kesanggupannja.⁵¹

KESIMPULAN

Dari kajian kualitatif-deskriptif ini disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, secara historis kaderisasi pada jam'iyah PERSIS telah berlangsung secara kultural, berbasis guru-murid. Pada tahap selanjutnya kaderisasi berlangsung melalui lembaga pendidikan non formal (kursus tabligh) dan formal (Pesantren). Kedua pola ini (tabligh dan pesantren) menjadi unsur pokok bagi tumbuh-berkembangnya Jamiyyah PERSIS, bahkan hingga era kontemporer.

Kedua, pelembagaan terstruktur kaderisasi jam'iyah PERSIS kontemporer telah dirumuskan, baik di tubuh PERSIS itu sendiri, maupun bagian otonomnya. Namun demikian, pelembagaan sistem

⁵¹ Muhammad Isa Anshary, *Falsafah Perdjuaan Islam* (Medan: Saiful, 1951), 153.

perkaderan PERSIS ini belum bersifat sistem yang menyeluruh dan terpadu. Masing-masing bagian masih berjalan dengan sistem dan pola kaderisasinya. Sinergi dan integrasi model kaderisasi Jam'iyah secara menyeluruh adalah tantangan strategis bagi PERSIS kontemporer.

Ketiga, yang terutama, adalah kerangka filosofis perkaderan Jam'iyah. Kerangka perkaderan pada Jam'iyah PERSIS secara filosofis belum kukuh. Konsep dasar kader belum disepahami bersama sebagai platform Jam'iyah. Karena itulah, masing-masing komponen Jam'iyah mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tentang makna kader dan perkaderan itu sendiri. Inilah tantangan pemikiran yang harus dikaji secara mendalam – dan radikal – oleh segenap eksponen Jam'iyah PERSIS.

Hasil kajian ini merekomendasikan agar sistem perkaderan PERSIS disusun dengan melibatkan seluruh *stakeholder* Jam'iyah, tidak hanya bagian otonom (Batom) PERSIS. Hal ini penting untuk memastikan sistem perkaderan PERSIS bersifat integral, menjadi acuan bersama seluruh pihak dalam jam'iyah. Sebagai sebuah sistem dan kesatuan yang utuh, maka Sistem Perkaderan PERSIS berlaku menyeluruh bagi semua jajaran dan komponen Jam'iyah. Konsekuensinya, Sistem Perkaderan PERSIS juga memuat atau mencakup seluruh bentuk dan jenis kaderisasi yang diterapkan di Jam'iyah, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal berarti Sistem Pendidikan Kader berlaku bagi seluruh tasykil pimpinan PERSIS, mulai dari Pimpinan Pusat (PP) hingga Pimpinan Cabang (PC) dan Jama'ah, sebagai acuan dan pola dalam pelaksanaan kaderisasi secara optimal sesuai dengan tingkatan masing-masing. Secara horizontal bermakna bahwa Sistem Perkaderan PERSIS berlaku dan mengikat seluruh unsur pembantu pimpinan (unsur dewan, seperti Dewan Hisbah, Dewan Hisab/Rukyah, Dewan Tafkir, dan unsur lembaga, seperti PZU, Sigab, Barigade, serta lembaga bela diri Lanah Syurulkhan), bagian otonom (Batom), badan usaha

Jam'iyah, dan khususnya lembaga pendidikan PERSIS, untuk dilaksanakan sebagai acuan dan pola kaderisasi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, Muhammad Isa. *Falsafah Perdjjuangan Islam*. Medan: Saiful, 1951.
- Antor, Heinz, Jonathan Crowther, Albert Sydney Hornby, dan Jacqueline Ward. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Berlin: Cornelsen, 1996.
- Azra, Azyumardi. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern "Ulamā" in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Crows Nest; Honolulu: Allen & Unwin; University of Hawai'i Press, 2004.
- Bachtiar, Tiar Anwar. *Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Politik Persis*, 2019.
- — —. *Sejarah Pesantren Persis, 1936-1983*. Jakarta: Pembela Islam, 2012.
- Darmadi, Dadi. "Pesantren Persis Pajagalan Bandung: dengan al-Qur'an dan Sunnah Mencetak Kader Ulama Harapan Umat." *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan* 3, no. 1 (1999).
- Fauzan, Pepen Irpan. "Persatuan Islam dan Permufakatan Islam: Kritik Terhadap Tesis Howard M. Fiederspiel tentang Sejarah Awal Persis." *STAI Persatuan Islam Garut* 1 (1 Januari 2016)
- — —. "Perumus Manifest Perjuangan Persatuan Islam." *Jurnal Studi Islam: STAI PERSIS GARUT* 1, no. 2 (2016)
- Fauzan, Pepen Irpan, dan Ahmad Khoirul Fata. "Jaringan Pesantren di Jawa Barat Tahun 1800-1945: Critical Review atas Disertasi 'Jaringan Pesantren di Priangan 1800-1945' Karya Ading Kusdiana." *Jurnal Lektur Keagamaan* 17, no. 1 (2019)
- — —. "Portraying Political Polarization in Persatuan Islam in the Case of Mohamad Natsir Vs Isa Anshari." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (30 Desember 2019) <https://doi.org/10.30821/jcims.v3i2.5589>.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing, 2009.

- Furqon, AM. "Kaderisasi Pemuda Persis." *Persis Jakarta* (blog), 26 November 2017. <http://persisjakarta.com/2017/11/26/kaderisasi-pemuda-persis-catatan-kecil-tafiq/>.
- Furqoni, Ridwan. "Studi Kritis Terhadap Sistem Perkaderan Muhammadiyah Sebagai Sistem Penyiapan Kader Muhammadiyah." Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Hafidz, Endang S., T. A. Bachtiar, D. A. Rahman, dan Pepen Irpan Fauzan. *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda PERSIS*. Bandung: Granada, 2005.
- Hamid, Hamdani. *Persatuan Islam dan Usaha Pembaharuan Pendidikan*. Bandung: Sumber Prima, 1993.
- Isnanto, Muh. "Gagasan Dan Pemikiran Muhammadiyah Tentang Kaderisasi Ulama (Studi Kasus Tentang Ulama Di Muhammadiyah)." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 2 (2018) <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1380>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>.
- Latif, Yudi. "The Muslim Intelligentsia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century," 2004. <https://doi.org/10.25911/5d7635934da2b>.
- Ma'arif, Ahmad. "Sistem Pendidikan Kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta Dan Madrasah Muallimin Bahrul Ulum Jombang Jawa Timur." Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/27403/>.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Combining Activism and Intellectualism: The Biography of Mohammad Natsir (1908-1993)." *Studia Islamika* 2, no. 1 (1995). <https://doi.org/10.15408/sdi.v2i1.844>.
- Manion, Melanie. "The Cadre Management System, Post-Mao: The Appointment, Promotion, Transfer and Removal of Party and State Leaders." *The China Quarterly*, no. 102 (1985).
- Minhaji, Akh. *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia:(1887-1958)*. Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.

- — —. "Islamic Reform in Contest: Ahmad Hassan and His Traditionalist Opponents." *Studia Islamika* 7, no. 2 (2000). <https://doi.org/10.15408/sdi.v7i2.710>.
- Natsir, M. *Pesan Perjuangan Seorang Bapak: Percakapan Antar Generasi*. Disunting oleh Ahmad Watik Pratiknya. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia : Laboratorium Dakwah, 1989.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Pedoman Jamiyyah dan Kaifiyat Kerja PERSIS 2015-2020*. Bandung: PP Persis, 2015.
- Penjelasan QA-QD PERSIS 2015-2020*. Bandung: Sekretaris PP PERSIS, 2018.
- PP PERSIS. *Tafsir Qanun Asasi-Qanun Dakhili Persatuan Islam*. Bandung: PP Persis, 1984.
- Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam*. Bandung: Sekretaris PP PERSIS, 2015.
- QA-QD PERSIS 2015-2020*. Bandung: Sekretaris PP PERSIS, 2015.
- Rahman, M. Taufiq, dan Beni Ahmad Saebani. "Membangun Gerakan Inklusivisme Model Jamaah Persatuan Islam." *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 1 (9 Juli 2018). <https://doi.org/10.15575/jt.v1i1.2488>.
- Rederspiel, Howard M. "Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited." *Al-Jami'ah* XII, no. 64 (18 Juli 2008). <https://doi.org/10/small.jpg>.
- Suharto, Toto. "Kontribusi Pesantren Persatuan Islam Bagi Penguatan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama* 11, no. 1 (2011): 109-33. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art5>.
- Suharto, Toto; *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*. Fataba Press, 2013.
- Tim Penyusun Bidang Kaderisasi PP Hima PERSIS. *Pedoman Kaderisasi, Pendidikan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Kader Hima PERSIS*. Bandung: Ulul Albab Publishing, 2019.
- Utama, Nia Erawati. "Kaderisasi Kepemimpinan Persis: Studi Deskripsi Persis Di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur." Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010. <http://digilib.uinsgd.ac.id/898/>.

- Wildan, Dadan. *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP. Pemuda Persatuan Islam dan Persis Press, 2000.
- Wildan, Dadan, Badri Khaeruman, M Taufiq Rahman, dan Latief Awaludin. *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Tangerang Selatan: Amana, 2015.
- Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.